



Governance Brief

Kemiskinan Masyarakat Desa Sekitar Hutan dan Penanggulangannya

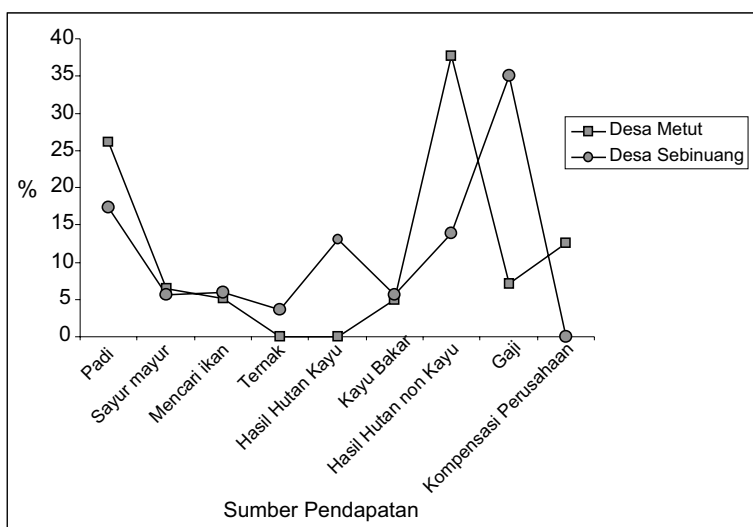
Studi Kasus di Kabupaten Malinau

Erna Rositah

Apakah peningkatan akses pemerintah setempat pada kekayaan hutan di Kabupaten berdampak pada kemiskinan? Bergulirnya otonomi daerah memberikan kewenangan bagi pemerintah kabupaten untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Kabupaten Malinau di Kalimantan Timur memiliki kesempatan yang sama untuk membangun kesejahteraan masyarakatnya. Meskipun kekayaan sumber daya alam terutama hutan melimpah (4,2 juta ha), pada kenyataannya Malinau belumlah mampu menjamin kehidupan dan penghidupan yang lebih baik bagi sebagian besar masyarakatnya. Populasi penduduk di kabupaten ini pada akhir tahun 2003 berjumlah 43.844 jiwa tersebar di sembilan wilayah kecamatan dan sebagian besar hidup dan tinggal di desa-desa pelosok, di dalam dan sekitar hutan. Pada tahun yang sama tercatat sekitar 47% rumah tangga atau keluarga miskin di kabupaten paling utara Kalimantan Timur ini (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Malinau, 2003).

Tujuan tulisan ini adalah untuk melihat dampak otonomi daerah pada kabupaten yang kaya hutan pada dua desa miskin, yaitu Desa Sebinuang (Kec. Malinau Utara) dan Desa Metut (Kec. Malinau Selatan) yang menjadi obyek kasus dalam penelitian ini. Desa ini dikunjungi pada bulan Juni sampai Agustus 2004. Metode yang dipakai untuk mengumpulkan data adalah observasi lapangan dan wawancara langsung. Jumlah responden di Desa Sebinuang 20 KK dan Desa Metut 33 KK.

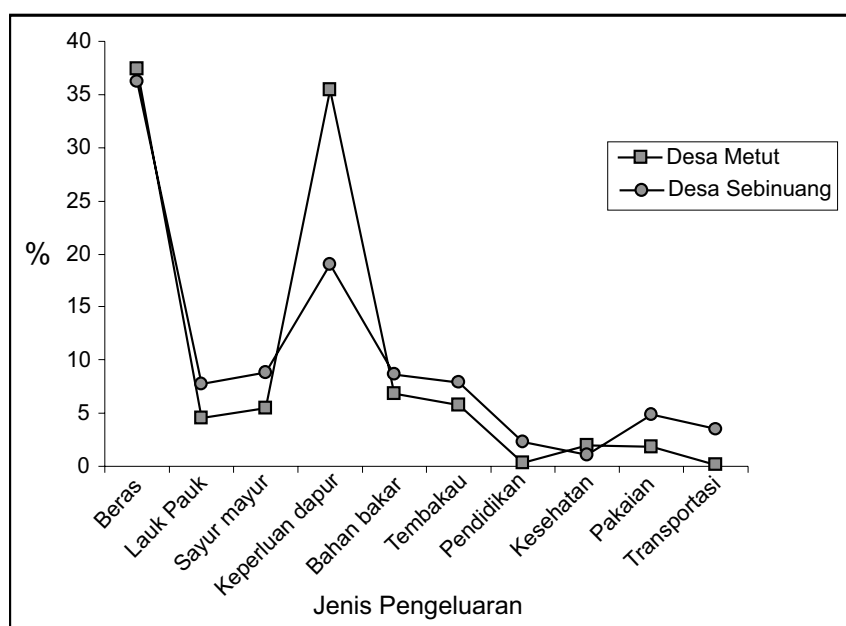


Gambar 1. Kontribusi masing-masing sumber pendapatan penduduk pertahun

Kontribusi hutan terhadap ekonomi keluarga

Modernisasi dan dinamika pembangunan di daerah terus berlangsung, namun peran hutan belum tergantikan bagi pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga di Desa Metut dan Sebinuang. Sebagian besar sumber penghasilan keluarga berasal dari hutan, baik untuk konsumsi maupun sebagai sumber penghasil uang tunai.

Pada Gambar 1 tampak bahwa di Desa Metut, kontribusi hasil hutan non kayu (terutama hasil usaha gaharu) adalah sumber pendapatan yang terbesar yaitu sekitar 37,64%, disusul penghasilan dari ladang 32,56%, kompensasi dari perusahaan kayu sebesar 12,6%, diikuti oleh gaji, usaha mencari ikan dan kayu bakar yang jumlah persentasenya di bawah 18%. Di Desa Sebinuang hasil dari gaji/upah memberikan kontribusi terbesar yaitu sekitar 34,98% disusul penghasilan yang bersumber dari ladang sekitar 22,97%, diikuti



Gambar 2. Rataan pengeluaran penduduk perjenis pengeluaran pertahun

hasil hutan non kayu 13,94%, hasil hutan kayu komersil 13,10% (di Metut tidak ada responden yang melakukan penebangan kayu untuk tujuan komersil) dan hasil mencari ikan, kayu bakar secara keseluruhan tidak lebih dari 16%. Besarnya kontribusi gaji/upah terhadap penghasilan penduduk Sebinuang berhubungan erat dengan kondisi keterbatasan (baik kuantitas maupun kualitas) hutan di sekitarnya. Untuk penghasilan berupa uang tunai, beberapa keluarga memperolehnya dari insentif sebagai pejabat desa dan adat setiap bulan. Sedangkan sumber gaji/upah lainnya diperoleh dari jasa bekerja sebagai buruh harian di tempat lain seperti di pusat kecamatan maupun Malinau Kota sebagai pusat kabupaten.

Dilihat dari persentase di atas, kontribusi hutan terhadap ekonomi masyarakat Desa Metut relatif lebih besar (meskipun tidak signifikan) daripada Desa Sebinuang. Faktor yang mempengaruhi, antara lain, akses terhadap hutan dan pasar serta ketersediaan alternatif sumber mata pencaharian selain hutan. Dalam hal ini masyarakat Desa Sebinuang yang tinggal di sekitar pusat kecamatan dan kabupaten

berkesempatan untuk mencari nafkah di luar hutan dan bekerja sebagai buruh. Sedangkan bagi masyarakat Desa Metut yang secara geografis tinggal di tengah hutan, relatif jauh dari dinamika perekonomian masyarakat di perkotaan dan sekitarnya. Dengan kondisi seperti ini, kecil peluang masyarakat untuk bisa terlibat dalam usaha alternatif (selain hutan) lainnya. Satu-satunya sandaran utama yang dapat menopang pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga adalah hutan.

Apakah masyarakat lokal miskin?

Tingkat kesejahteraan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan garis kemiskinan Sayogyo. Garis kemiskinan Sayogyo adalah total pengeluaran keluarga dibagi dengan harga beras lokal dan jumlah anggota keluarga (Sayogyo, 1977 dalam Seldadyo, dkk. 2003). Data pengeluaran dikumpulkan dengan menggali informasi tentang pengeluaran keluarga per periode waktu tertentu disesuaikan dengan kondisi harga yang berlaku di tingkat lokal. Pengeluaran per kapita per tahun penduduk disajikan pada Tabel 1 dan Gambar 2.

Tabel 1. Pengeluaran Per Kapita Penduduk Per Tahun (2003/2004)

Desa	Pengeluaran (Rp/kk/th)	Rataan Anggota Keluarga (Jiwa)	Pengeluaran Per Kapita Per Tahun	
			Rp/Kap/Th	Satuan Beras Kg/Kap/Th
Sebinuang	4.235.305	3,8	1.114.554	318
Metut	7.081.758	4,5	1.573.724	315

Catatan: Harga beras Di Desa Sebinuang Rp 3.500,-/kg dan Desa Metut Rp.5.000,- /kg

Tabel 2. Konsumsi Beras Penduduk Desa Sebinuang dan Metut (2003/2004)

Desa	Nilai konsumsi beras pertahun (Rp/Th)	Rataan anggota keluarga (jiwa)	Harga beras (Rp/Kg)	Rataan konsumsi (Kg/kap/th)	Rataan konsumsi perbulan (Kg/kap/bln)
Sebinuang	1.532.500	3,8	3.500	115	9,6
Metut	2.651.515	4,5	5.000	118	9,8

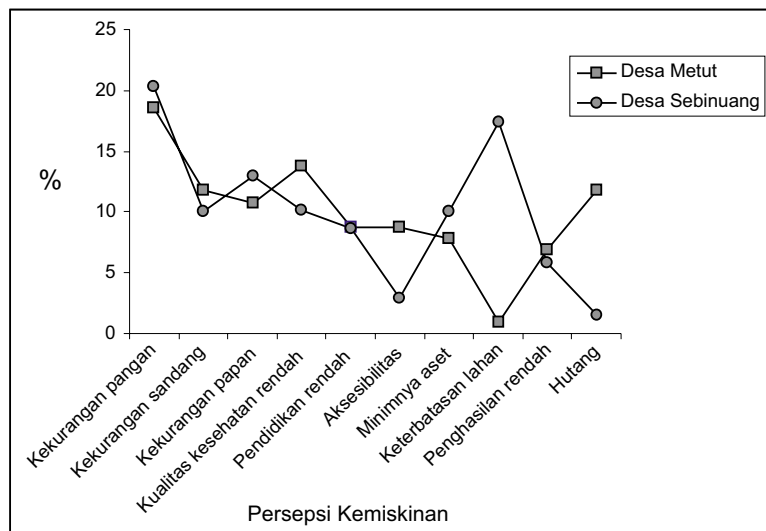
Dari Tabel 1 tampak adanya perbedaan pengeluaran yaitu sekitar 40% antar kedua desa. Perbedaan tersebut disebabkan terutama oleh harga barang-barang kebutuhan pokok di Desa Metut yang lebih tinggi dari Sebinuang dengan variasi antara 30 - 100%. Bahan kebutuhan pokok rumah tangga khususnya jenis-jenis barang yang harus diperoleh (dibeli) dengan uang tunai mendominasi besarnya pengeluaran secara keseluruhan. Dibandingkan dengan garis kemiskinan (*poverty line*) Sayogyo (Sayogyo 1971), yang menyatakan bahwa kemiskinan sebagai suatu tingkat konsumsi pangan dan non pangan yang kurang dari setara 480 kg di perkotaan dan 320 kg beras untuk pedesaan, maka kedua desa tersebut termasuk ke dalam kategori miskin.

Dari Tabel 2, rata-rata konsumsi beras per kapita penduduk per bulan di Desa Sebinuang dan Metut masing-masing 9,6 dan 9,8 kg beras/kap/bulan. BPS menghitung angka kemiskinan menggunakan indikator dari sisi makanan yaitu 2.100 kalori per orang per hari (Anonim, 2004^a). Rao dalam Seldadyo dkk. (2003), dengan asumsi 2.150 kalori sebagaimana direkomendasikan FAO, menemukan bahwa 16 kg beras per bulan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan kalori per orang. Dengan demikian kedua desa lokasi studi, kekurangan konsumsi sekitar 6,2 - 6,4 kg beras/kap/bulan.¹

Sistem perladangan tradisional skala subsisten belum tentu menghasilkan padi yang mampu memenuhi kebutuhan konsumsi keluarga hingga musim panen tahun berikutnya. Pada kenyataannya, untuk kelompok masyarakat Suku Punan umumnya, kekurangan akan konsumsi beras dapat disubstitusi oleh sagu hutan (*Eugeissona utilis*) ataupun ubi kayu. Sagu hutan (*Eugeissona utilis*) ataupun ubi kayu merupakan makanan alternatif utama dan menjadi makanan khas masyarakat Suku Punan secara turun temurun, meskipun belum ada penelitian spesifik tentang kandungan kalori terhadap kedua jenis sumber pangan tersebut.

Persepsi lokal mengenai kemiskinan

Gambar 3 menunjukkan variabilitas persepsi responden mengenai kemiskinan. Kekurangan pangan paling banyak dikaitkan dengan kondisi kemiskinan oleh kedua desa. Kekurangan pangan dimaksud dalam hal ini bukan saja terpenuhinya kebutuhan makan setiap hari, tetapi juga berkaitan dengan kualitas (gizi), variasi makanan (menu) dan kontinuitas. Pakaian yang dimiliki sangat terbatas, dalam pengertian hampir tidak ada peruntukkan pakaian khusus untuk aktivitas tertentu. Kondisi rumah tempat tinggal juga dipandang tidak jauh berbeda oleh responden



Gambar 3. Variabilitas Persepsi Responden Mengenai Kemiskinan

di kedua desa tersebut. Rumah-rumah yang ada umumnya bermaterialkan bahan bekas bangunan kamp perusahaan. Bahkan sebagian keluarga belum memiliki kemampuan untuk membeli atau pun menyediakan sebagian besar material bangunan rumah, sehingga harus hidup menumpang bersama orang tua ataupun keluarga dekat.

Kondisi saat ini sudah jauh lebih baik bila dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya, di mana beberapa keluarga hidup bersama dalam rumah pondok beratap daun dan berdingdingan kulit kayu. Empat puluh dua persen dari responden di Metut mengatakan masalah kesehatan cukup berpengaruh terhadap kemiskinan, sedangkan di Desa Sebinuang 35%. Keterkaitan kesehatan dengan kemiskinan yang dirasakan oleh sebagian besar masyarakat di Desa Metut ini berhubungan dengan belum adanya sarana kesehatan yang dapat diakses dan dimanfaatkan masyarakat di desa ataupun di sekitarnya. Bila ingin berobat, mereka harus ke desa lain yang cukup jauh dari desa dan harus mengeluarkan biaya (terutama untuk transportasi). Kurang dari aspek pendidikan dimaksud, lebih kepada rendahnya pendidikan masyarakat. Di Desa Metut, buta huruf dan tidak tamat SD masing-masing 50% dan 17%, dan Desa Sebinuang 20% dan 37%. Kondisi yang juga memiliki peran terhadap kondisi pemiskinan masyarakat khususnya di Desa Sebinuang adalah keterbatasan lahan baik untuk kegiatan pertanian (perladangan) maupun hutan sebagai sumber penghidupan masyarakat.

Di Desa Metut, masalah hutang dipandang 36% sebagai salah satu aspek yang menunjukkan keparahan kondisi kemiskinan masyarakat. Sistem yang diterapkan oleh pemilik modal kepada pencari gaharu menciptakan ketergantungan masyarakat kepada pemilik modal hingga harus terus-menerus menanggung hutang. Sementara itu penghasilan yang kecil dan tidak menentu dari usaha tersebut tidak seimbang dengan modal kerja dan biaya hidup keluarga.

Mengapa masyarakat miskin?

Kemiskinan masyarakat bersifat multidimensi dengan faktor penyebab yang kompleks. Kemiskinan komunitas Punan di kedua desa penelitian secara historis telah berlangsung lama dan terus berada dalam lingkaran kemiskinan meski Otonomi Daerah telah diimplementasikan. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, secara umum penyebab kemiskinan masyarakat di dua desa tersebut dapat dikelompokkan menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor internal antara lain:

- Sumber daya manusia rendah,
- Budaya masyarakat,
- Motivasi lemah,
- Pola hidup konsumtif, dan
- Jumlah penduduk terlalu sedikit.

Rendahnya sumberdaya masyarakat lokal turut mengkondisikan kehidupan sosial ekonomi masyarakat setempat. Meski secara historis-tradisional mereka memiliki ketangguhan untuk bertahan hidup di tengah hutan lengkap dengan kemampuan meramu pengalaman menjadi sebuah kearifan lokal dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya hutan di lingkungannya, belum cukup menjadikan mereka kuat menghadapi berbagai intervensi pihak luar yang memanfaatkan kekayaan sumber daya alam di sekitarnya. Akibatnya, desa yang tidak memiliki lahan pertanian dan hutan lagi, seperti di lokasi Sebinuang, menjadi semakin terdesak.

Rendahnya sumberdaya masyarakat berpengaruh pula terhadap kecilnya peluang dan daya saing masyarakat secara ekonomi dan sosial termasuk memanfaatkan kesempatan untuk bekerja di lingkungan pemerintahan, bahkan kemampuan mengakses birokrasi. Ketidaksiapan masyarakat lokal dalam menghadapi modernisasi juga menjadi salah satu faktor yang semakin memarginalkan posisi mereka secara ekonomi politik.

Masyarakat yang selama ini tinggal di tengah alam yang kaya akan sumber pangan juga dikenal konsumtif. Penghasilan tunai yang diperoleh dari hasil usaha tidak jarang dimanfaatkan untuk berpesta pora. Tidak



ada representasi dari kelompok komunitas Punan yang dapat dijadikan panutan untuk bangkit dari ketertinggalan, antara lain dalam birokrasi pemerintahan di daerah. Peran mereka dalam ekonomi hampir tidak diperhitungkan (baca: dominan). Eksistensi masyarakat Punan (diakui atau tidak), masih dicitrakan dengan keterisolasian dan keterbelakangan oleh kelompok masyarakat lain. Latar belakang keterisolasian secara ekonomi, sosial dan budaya sebagaimana dicontohkan di atas menjadi bagian penyebab tidak berkembangnya motivasi masyarakat, yang akhirnya berdampak terhadap lambannya dinamika perekonomian di tingkat lokal, terlebih bila dibandingkan dengan perkembangan kelompok masyarakat lain di sekitarnya. Minimnya jumlah penduduk dalam satu desa juga menjadi bagian penyebab lambannya perkembangan sosial ekonomi masyarakat (berdasarkan SK. Bupati No. 176/2004, Desa Sebinuang digabung dengan empat desa resetelmen penduduk lainnya menjadi Desa Lubok Manis). Kecenderungan penduduk memiliki sumber mata pencaharian seragam - petani. Anonim (2004^b), menyebutkan bahwa sedikitnya penduduk menyulitkan masyarakat untuk berkembang karena manusia sendiri adalah pasar dari produk daerah tersebut. Selain itu berpengaruh pula terhadap perhatian pemerintah daerah dalam pengertian ada kecenderungan untuk lebih memprioritaskan wilayah/desa yang besar dengan jumlah penduduk yang juga lebih banyak dengan pertimbangan efektivitas dan efisiensi program. Beberapa faktor eksternal penyebab kemiskinan antara lain:

- program resetelmen penduduk (respen) desa di masa lalu setengah hati (baca: tidak tuntas),
- aspek kebijakan kehutanan yang tidak memihak kepada kepentingan masyarakat sekitar hutan, bahkan memarjinalkan posisi dan peran mereka terhadap akses pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan,
- kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan mengandung makna pelemahan sistem politik masyarakat dan nilai-nilai lokal,
- terpaan krisis ekonomi dan moneter yang berimplikasi terhadap seluruh persendian ekonomi,
- tekanan populasi penduduk terutama para pendatang kian membuat posisi masyarakat (terutama masyarakat respen Sebinuang) terdesak, dengan konsekuensi logis meluasnya pemanfaatan ruang dan lahan dan berimplikasi terhadap nilai lahan-hutan yang turut melonjak.



Foto oleh Eva Wollenberg

Intervensi Penanggulangan Kemiskinan Pemerintah Kabupaten Malinau

Sebagai kabupaten baru yang dimekarkan tahun 1999, Malinau terus menerus memanfaatkan peluang otonomi daerah guna menggiatkan pembangunan multi sektoral. Gerakan pembangunan desa mandiri (Gerbangdema) menjadi muara gerakan pembangunan (*mainstream development*) yang mewarnai seluruh kebijakan pembangunan di kabupaten paling utara Kaltim ini. Implementasi Gerbangdema dituangkan ke dalam delapan program-program yang saling terkait, yaitu: (1) sumberdaya masyarakat; (2) ekonomi; (3) infrastruktur; (4) kelembagaan; (5) kesehatan; (6) pertanian; (7) perkebunan dan kehutanan; serta (8) pemberdayaan perempuan.

Ujung tombak pelaksana program di lapangan adalah instansi-instansi yang terkait langsung dengan program. Sedangkan Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK) sejauh keberadaannya tidak berperan aktif baik dalam menjalankan fungsi merumuskan strategi penanggulangan kemiskinan di daerah termasuk koordinasi pelaksanaannya. Program penanggulangan kemiskinan yang dijalankan oleh dinas-dinas terkait adalah program rutin - meski KPK tidak terbentuk. Hasil penelitian Andrianto (2005) di daerah yang sama menyebutkan, pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dijalankan oleh anggota KPK bukan berasal dari pembahasan bersama dan koordinasi antar anggota, tetapi atas usulan masing-masing instansi dan terlepas dari KPK.

Secara umum implikasi intervensi pemerintah daerah terhadap beberapa aspek di Desa Sebinuang dirasakan lebih baik dibandingkan Desa Metut. Faktor aksesibilitas berpengaruh terhadap perbedaan kondisi di kedua desa tersebut. Kecenderungan daerah dengan akses baik relatif mendapatkan lebih banyak dampak (positif dan atau negatif) dari pembangunan dibandingkan daerah dengan akses sedang dan terpencil. Dalam hal ini pembangunan fasilitas infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, kesehatan, pendidikan dan berbagai fasilitas umum lainnya di kecamatan maupun kabupaten, memberi cukup manfaat bagi masyarakat. Kondisi ini secara simultan berdampak multi aspek terhadap kehidupan masyarakat. Dari aspek ekonomi, aksesibilitas juga mempengaruhi tingkat harga barang atau bahan kebutuhan pokok. Desa Sebinuang yang dekat dengan pusat (Malinau), ditunjang dengan lancarnya mobilitas alat transportasi, menyebabkan harga barang/bahan kebutuhan pokok relatif stabil. Berbeda halnya dengan Desa Metut, dengan jarak geografis yang jauh dan keterbatasan sarana transportasi berpengaruh terhadap lonjakan harga. Kondisi ini semakin dipersulit oleh terbatasnya sumber mata pencaharian dan mekanisme pasar di tingkat lokal (khususnya dalam penjualan gaharu) yang tidak sehat dan cenderung merugikan masyarakat. Rendahnya daya beli masyarakat mempengaruhi kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Beberapa catatan penting dari implementasi program-program kemiskinan tersebut antara lain: tidak berjalannya fungsi Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK) Kab. Malinau; program belum menyentuh kebutuhan

dasar perekonomian masyarakat; prioritas pembangunan pada pengadaan/perbaikan infrastruktur dan pengadaan staf di lingkungan pusat pemerintahan dan sekitarnya dan berpengaruh terhadap minimnya dana program pemberdayaan; lemahnya sistem kelembagaan di level pemerintahan; belum berjalannya proses pendampingan terhadap program berjalan; program dilaksanakan dengan pendekatan proyek dengan jangka pendek dan tidak berjalan secara simultan; pemberdayaan melalui kerjasama dengan pihak-pihak lembaga swadaya masyarakat (LSM) ataupun kelompok swadaya masyarakat (KSM) belum berjalan; pemetaan dan identifikasi kebutuhan lokal sebagai dasar penyusunan program belum terlaksana dengan baik; dan kurangnya pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan dan pengambilan keputusan; ditinjau dari aspek ekonomi, program penanggulangan kemiskinan belum mampu menurunkan tingkat ketergantungan masyarakat terhadap hutan. Bagi masyarakat Desa Sebinuang dan Metut, penurunan penghasilan yang bersumber dari hutan, bukan semata disebabkan oleh ketersediaan alternatif sumber mata pencaharian lain selain hutan, tetapi penyempitan ruang gerak masyarakat dan penyusutan kualitas dan kuantitas hutan.

Dinamika pembangunan di daerah terus berlangsung, namun peran hutan bagi masyarakat Desa Sebinuang dan Metut tetap sangat vital baik secara ekonomi, sosial, religi maupun dari aspek konservasi. Meski tidak membebaskan mereka dari lingkaran kemiskinan, namun setidaknya relatif dapat memberi kontribusi bagi pemenuhan kebutuhan pangan sehari-hari sesuai standar lokal.



Foto oleh Christian Cossalter



Foto oleh Eva Wollenberg

Rekomendasi

- Mengingat pentingnya hutan sebagai sumber penghidupan (a.l. sebagai sumber cadangan pangan, papan, obat-obatan, religi dan konservasi) bagi masyarakat tradisional sekitar hutan, pemerintah Kab. Malinau hendaknya memformulasi kebijakan kehutanan yang dapat memberi kontribusi terhadap pembangunan daerah sekaligus melindungi hak-hak tanah dan sumber daya hutan masyarakat tradisional di sekitarnya.
- Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK) Daerah Kabupaten Malinau seharusnya mulai membangun komitmen yang kuat terhadap upaya penanggulangan kemiskinan di daerah dan merangkul stakeholders non pemerintah yang diharapkan dapat memberikan inisiatif yang kreatif, inovatif dan adoptif terhadap perumusan dan pelaksanaan program.
- Diperlukan sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan masyarakat dengan kebutuhan spesifik wilayah/desa melalui proses perencanaan secara partisipatif dan proses pendampingan masyarakat dalam pelaksanaannya oleh pihak-pihak terkait dan memiliki komitmen terhadap upaya penanggulangan kemiskinan.

Catatan Kaki

¹ Tidak ditemukan data BPS yang persis untuk menghitung berapa setara beras untuk 2.100 kalori menurut BPS tersebut.

Referensi

- Anonim. 2004^a. Pengentasan Kemiskinan Masih Sebatas Proyek. Warta FKMM. Edisi Oktober 2004. Bul. 7 No. 10. Bogor.
- Anonim. 2004^b. Memahami Kemiskinan, Kehutanan Alat dan Analisisnya. Kumpulan Makalah Pelatihan AKP-FKM. Center for Economic and Social Studies (Cess) di dukung oleh Department for International Development - Overseas Development Institute (odi).
- Andrianto, A. 2005. Kemiskinan Di Daerah Disebabkan Kebijakan (Jakarta) Sentralistis. Paper dan Dipresentasikan pada Indonesia BMZ Team Meeting. Bogor.
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Malinau 2003. Rencana Strategis Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Malinau. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kabupaten Malinau.
- Sayogyo. 1971. Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan Di Daerah Istimewa Yogyakarta 1984-1987. Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta. (Akses pada <http://202.259.18.43/jsi/2lch.htm>)
- Seldadyo, H. S. dkk. 2003. Program Anti Kemiskinan Di Indonesia. Pemetaan Informasi dan Kegiatan. Center for Economic and Social Studies di dukung oleh Department for International Development - Overseas Development Institute.

Governance Brief ini ditulis dalam rangka partisipasi penulis dalam “*Poverty and Decentralization Project*” yang diselenggarakan atas kerjasama CIFOR dan BMZ Jerman dan merupakan ringkasan thesis Pascasarjana (S2) Kehutanan Universitas Mulawarman Samarinda, Kalimantan Timur tahun 2005 dengan judul “Kajian Kemiskinan Masyarakat Desa Sekitar Hutan dan Upaya Penanggulangannya di Kabupaten Malinau Propinsi Kalimantan Timur”.



Bundesministerium für
wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung



Center for International Forestry Research, CIFOR
Alamat kantor: Jalan CIFOR, Situ Gede, Sindang Barang
Bogor Barat 16680, Indonesia.
Alamat surat: P.O. Box. 6596 JKPWB, Jakarta 10065
Indonesia

Tel: +62(251) 622 622 Fax: +62(251) 622 100
E-mail: cifor@cgiar.org
Website: www.cifor.cgiar.org
Foto sampul oleh: Edmond Dounias dan Rona Dennis

FUTURE
HARVEST

Program *Forests and Governance* di CIFOR mengkaji cara pengambilan dan pelaksanaan keputusan berkenaan dengan hutan dan masyarakat yang hidupnya bergantung dari hutan. Tujuannya adalah meningkatkan peran serta dan pemberdayaan kelompok masyarakat yang kurang berdaya, meningkatkan tanggung jawab dan transparansi pembuat keputusan dan kelompok yang lebih berdaya dan mendukung proses-proses yang demokratis dan inklusif yang meningkatkan keterwakilan dan pengambilan keputusan yang adil di antara semua pihak.